

Pembahasan pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan surat edaran direktur jenderal pajak No. SE-18/PJ.3/1989 pada biro perjalanan umum : studi kasus pada biro perjalanan umum 'XY'

Darwanti Juliastuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20320535&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan, dunia kepariwisataan yang semakin pesat mendorong tumbuh dan berkembangnya pula Biro Perjalanan Umum di Indonesia. Biro Perjalanan Umum memiliki potensi yang besar sebagai salah satu penyumbang Pajak Pertambahan Nilai yang potensial. Penulis mencoba membahas sampai sejauh mana penerapan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan SE-18/PJ.3/1989 dalam Biro Perjalanan Umum. Dalam usaha untuk membahas permasalahan Pajak Pertambahan Nilai dalam Biro Perjalanan Umum di Indonesia penulis melakukan studi kasus di Biro Perjalanan Umum XY serta membandingkan hasil penelitian itu dengan teori yang ada. Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis memperoleh hasil untuk penjualan tiket internasional, tidak semua penjualan yang terjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga halnya dengan penjualan paket wisata dalam negeri dan luar negeri Sedangkan untuk penjualan tiket domestik pengenaan PPNnya telah dilakukan dengan benar. Demikian juga halnya dengan penjualan untuk dokumen perjalanan. Masih terdapat FPN yang telah dipungut oleh Biro Perjalanan umum 'XV' dari konsumen yang belum disetorkan ke kas negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa ternyata Biro perjalanan Umum 'XV' belum sepenuhnya menerapkan Undang-undang PFN. 1984 dan SE- 18/PJ.3/1989 dengan benar. Hal ini disebabkan karena adanya penafsiran yang berbeda terhadap Undang-undang dan surat edaran tersebut. Oleh sebab itulah penulis menyarankan agar Biro Perjalanan Umum 'XV' lebih memperhatikan lagi tentang pungutan PFN atas penjualan yang terjadi. Kemudian kepada pihak fiskus agar lebih jelas dan tegas lagi dalam membuat peraturan perpajakan.